BAHAN AJAR

MATAKULIAH

PERENCANAAN PEMBANGUNAN

(UNTUK KALANGAN SENDIRI)

SEMESTER GANJIL 2021/2022

OLEH : DRS. DERADJAT MAHADI SASOKO, MM

DOSEN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA

UNIVERSITAS JAYABAYA

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ii
PENDAHULUAN 1
LATAR BELAKANG 1
RUMUSAN MASALAH 1
TUJUAN PENULISAN 2
MANFAAT PENULISAN 2
PENUTUP 3
BAB 1 : MUNCULNYA ILMU PERENCANAAN PEMBANGUNAN 4
BAB 2 : BEBERAPA PENGERTIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 5
BEBERAPA PENGERTIAN 5
BAB 3 : FUNGSI-FUNGSI DAN TUJUAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PERENCANAAN PEMBANGUNAN DALAM PERPSEKTIF LINGKUNGAN, DAN PENDEKATAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 8
BAB 4 : TUJUAN DAN SASARAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 13
BAB 5 : TAHAPAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 14
BAB 6 : UNSUR POKOK PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 17
BAB 7 : RUANG LINGKUP DAN BENTUK PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 19
BAB 8 : UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS) 22
BAB 9 : SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DAN DAERAH 23
BAB 10 : PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM ERA OTONOMI 26
BAB 11 : PERENCANAAN DAN PELAKSANAANNYA 30
BAB 12 : TEKNIK PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 33
BAB 13 : TEKNIK PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 36
BAB 14 : TEKNIK PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 40
BAB 15 : PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 44
BAB 16 : UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS) 47
REFERENSI BUKU PEGANGAN : 48

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Di dalam melakukan pembangunan, Pemerintah memerlukan perencanaan yang baik dan akurat serta diharapkan dapat melakukan evaluasi terhadap pembangunan yang dilakukannya. Seiring dengan semakin pesatnya pembangunan, maka terjadi peningkatan permintaan data dan indikator-indikator yang menghendaki ketersediaan data sampai tingkat Kabupaten/Kota. Data dan indikator-indikator pembangunan yang diperlukan adalah yang sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Struktur perencanaan pembangunan di Indonesia berdasarkan hirarki dimensi waktunya berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dibagi menjadi perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek (tahunan), sehingga dengan Undang-Undang ini kita mengenal satu bagian penting dari perencanaan wilayah yaitu apa yang disebut sebagai rencana pembangunan daerah, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-D), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-D) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) sebagai kelengkapannya.

RUMUSAN MASALAH

1. Apakah yang dimaksud dengan Perencanaan
2. Apa sajakah sasaran pendekatan dalam pembangunan
3. Apa sajakan tujuan perencanaan
4. Apa sajakah manfaat perencanaan
5. Bagaimanakah langkah-langkah dan syarat perencanaan
6. Apakah yang dimaksud ruang lingkup perencanaan
7. Apa sajakah klasifikasi perencanaan

8. Bagaimanakah tahapan perencanaan
9. Apa sajakah unsur – unsur pokok perencanaan pembangunan
10. Bagaimanakah proses dan siklus perencanaan pembangunan

TUJUAN PENULISAN

1. Mengetahui defenisi perencanaan.
2. Mengetahui sasaran pendekatan dalam pembangunan.
3. Mengetahui tujuan perencanaan.
4. Mengetahui manfaat perencanaan
5. Mengetahui langkah-langkah dan syarat perencanaan
6. Mengetahui ruang lingkup perencanaan
7. Mengetahui klasifikasi perencanaan
8. Mengetahui tahapan perencanaan
9. Mengetahui unsur – unsur pokok perencanaan pembangunan
10. Mengetahui proses dan siklus perencanaan pembangunan

MANFAAT PENULISAN

1. Mahasiswa dapat mengetahui pengertian perencanaan.
2. Mahasiswa dapat mengetahui pendekatan dalam pembangunan.
3. Mahasiswa mampu menyebutkan tujuan perencanaan.
4. Mahasiswa dapat mengetahui manfaat perencanaan.
5. Mahasiswa dapat mengetahui langkah-langkah dan syarat perencanaan.
6. Mahasiswa dapat mengetahui ruang lingkup perencanaan.
7. Mahasiswa mampu menyebutkan klasifikasi perencanaan
8. Mahasiswa mampu menyebutkan tahapan perencanaan
9. Mahasiswa dapat mengetahui unsur – unsur pokok perencanaan pembangunan
10. Mahasiswa dapat mengetahui proses dan siklus perencanaan pembangunan.

PENUTUP

Kesimpulan Manfaat dari Perencanaan adalah Diharapkan terdapat suatu pengarahan kegiatan, adanya pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ditujukan kepada pencapaian tujuan pembangunan. Dapat dilakukan suatu perkiraan terhadap hal-hal dalam masa pelaksanaan yang akan dilalui. Perkiraan dilakukan mengenai potensi dan prospek pengembangan, juga mengenai hambatan dan resiko yang mungkin dihadapi. Memberi kesempatan untuk memilih berbagai alternatif tentang cara yang terbaik atau kesempatan untuk memilih kombinasi cara yang baik. Dapat dilakukan penyusunan skala prioritas, memilih urutan dari segi pentingnya suatu tujuan, sasaran maupun kegiatan usahanya . Akan ada suatu alat pengukur untuk mengadakan suatu pengawasan dan evaluasi. Perkembangan ekonomi yang mantap atau pertumbuhan ekonomi yang terus menerus dapat ditingkatkan. Dapat dicapai stabilitas ekonomi. Didalam melakukan pembangunan, Pemerintaah memerlukan perencanaan yang akurat serta diharapkan dapat melakukan evaluasi terhadap pembangunan yang dilakukannya.Seiring dengan semakin pesatnya pembangunan bidang ekonomi, maka terjadi peningkatan permintaan data dan indikator-indikator yang menghendaki ketersediaan data sampai tingkat Kabupaten/ Kota.Data dan indikator-indikator pembangunan yang diperlukan adalah yang sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

BAB 1 : MUNCULNYA ILMU PERENCANAAN PEMBANGUNAN

MUNCULNYA ILMU PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Ilmu Perencanaan Pembangunan awalnya muncul dinegara-negara yg menganut paham sosialis

Kemudian IPP berkembang di negara-negara non-sosialis setelah PD II

Ada dua kelompok negara yg ingin memacu proses pembangunan secepat mungkin :

1) Negara yg kalah perang seperti Jerman, Italia dan Jepang;

2) Negara yg baru merdeka (untuk mengejar ketertinggalan) – muncul istilah lingkaran kemiskinan

Mengapa Perlu Perencanaan ?

Ada negara tidak menggunakan sistem perencanaan utk mendorong proses pembangunan, tetapi proses pembangunan didorong dan dikendalikan melalui invisible hand (tangan yg tak tampak) melalui mekanisme pasar.

Ada negara (Sosialis) – peran pemerintah sangat besar dan peran sektor swasta dibatasi.

Perencanaan pembangunan untuk :

mengarahkan,

mengkoordinasikan,

mengendalikan dan

mendorong proses pembangunan.

Alasan Negara Berkembang Memerlukan Sistem Perencanaan Pembangunan

Kegagalan Mekanisme Pasar

Ketidakpastian Masa Depan

Untuk Mengarahkan Kegiatan Pembangunan

BAB 2 : BEBERAPA PENGERTIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

BEBERAPA PENGERTIAN

1. Pengertian Perencanaan

Perencanaan adalah sebuah patokan untuk mempermudah tercapainya suatu tujuan, membuat strategi untuk mencapai tujuan itu, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi.

Menurut *Alder* dan *Rustiadi* (2008:339) menyatakan bahwa **perencanaan adalah**, ”Suatu proses menentukan apa yang ingin dicapai dimasa yang akan datang serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya”.

Perencanaan adalah suatu proses yang menguraikan tujuan dari organisasi, serta menentukan strategi yang akan digunakan untuk mencapai tujuan organisasi. Perencanaan merupakan proses- proses yang penting dari semua fungsi manajemern sebab tanpa perencanaan (Planning) fungsi pengorganisasian, pengontrolan maupun pengarahan tidak akan dapat berjalan .

2. Pengertian Pembangunan

Berikut beberapa pengertian pembangunan menurut para ahli :

a. Todaro : **Pembangunan dibagi dalam tiga komponen dasar**, sebagai basis konseptual dan pedoman praktis dalam memahami pembangunan yang paling hakiki yakni

a. kecukupan yang memenuhi kebutuhan pokok,
b. meningkatkan rasa harga diri atau jati diri serta
c. kebebasan dalam memilih

selanjutnya Todaro mengemukakan bahwa

pembangunan adalah suatu proses multidimensional yang mencakup berbagai hal yang mendasar atas struktur sosial sikap-sikap masyarakat, dan institusi nasional, disamping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan,pengentasan kemiskinan.

b. Ginanjar kartasmista :

Pembangunan adalah suatu proses perubahan kearah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana.

c. Siagian :

Pembangunan adalah rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara atau bangsa yang menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (nation building)

d. Deddy T.Tikson :

Pembangunan merupakan transformasi ekonomi, strategi dan budaya yang secara sengaja melalui kebijakan dan juga strategi menuju kearah yang diinginkan.

d. Surkino :

Pembangunan adalah suatu usaha proses yang menyebabkan pandapatan perkapita masyarakat dapat meningkat dalam jangka panjang.

Jadi pembangunan adalah rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan kearah yang lebih baik melalui upaya yang di- lakukan secara terencana dengan menggunakan sumberdaya untuk mencapai tujuan mewujudkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan.

3. Pengertian perencanaan pembangunan

Perencanaan pembangunan akan menjadi bahan pedoman atau acuan dasar bagi pelaksanaan pembangunan (action plan). Oleh karena itu, perencanaan pembagunan hendaknya bersifat implementatif (dapat dilaksanakan) dan aplikatif (dapat diterapkan) Terdapat banyak pengertian perencanaan pembangunan menurut para ahli dan menurut undang-undang No. 25 tahun 2004

Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional :

a. Riyadi dan Bratakusumah :

perencanaan pembangunan adalah suatu proses perumusan alternatif-alternatif atau keputusan-keputusan yang didasarkan pada data-data dan fakta-fakta yang akan digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan suatu rangkaian kegiatan / aktivitas .

b. Conyers dan Hills :

Perencanaan pembangunan adalah suatu proses berkesinambungan yang mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan berbagai alternatif penggunaan sumberdaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa yang akan datang

c. Arthur W. Lewis :

perencanaan pembangunan merupakan suatu kumpulan kebijaksanaan dan program pembangunan untuk mendorong masyarakat dan swasta untuk menggunakan sumberdaya yang tersedia secara lebih produktif.

d. M. L. Jhingan :

Perencanaan pembangunan pada dasarnya merupakan pengendalian dan pengaturan perekonomian dengan sengaja oleh suatu penguasa (pemerintah) pusat untuk mencapai suatu sasaran dan tujuan tertentu didalam jangka waktu tertentu pula

e. Perencanaan pembangunan menurut uu no. 25 tahun 2004
mendefinisikan perencanaan pembangunan sebagai berikut" **Sistem Perencanaan Pembangunan Nasioanl (SPPN)** adalah suatu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka tahunan, yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat ditingkat pusat dan daerah.

B. FUNGSI-FUNGSI DAN TUJUAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Perencanaan dalam arti seluas-luasnya adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Perencanaan adalah suatu cara bagaimana mencapai tujuan sebaik- baiknya (maximum output) dengan sumber-sumber yang ada agar lebih afisien dan efektif. Perencanaan adalah penentuan tujuan yang akan dicapai dilakukan, bagaimana, bilamana,dan oleh siapa.

Albert waterston menyebutkan **perencanaan adalah** melihat kedepan dengan mengambil pilihan berbagai alternatif dari kegiatan untuk mencapai tujuan masa depan tersebut dengan terus mengikuti agar supaya pelaksanaannya tidak menyimpang dari tujuan. **Perencanaan pembangunan** adalah suatu pengarahan penggunaan sumber-sumber (termasuk sumber- sumber ekonomi) yang terbatas adannya, untuk mencapai tujuan-tujuan keadaan sosial ekonomi yang lebih baik secara efisien dan afektif.
Perencanaaan pembangunan nasional adalah suatu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam **jangka panjang**, **jangka menengah**, dan **tahunan** yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan negara dan masyarakat ditingkat pusat dan daerah.

Dalam pasal 2 ayat (4) uu No. 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan Nasioanal, bahwa sistem perencanaan pembangunan nasional **betujuan untuk** :

a. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan
b. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antar pusat dan daerah.
c. Menjamin keterkaitan dan konsistasi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
d. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat
e. Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

BAB 3 : FUNGSI-FUNGSI DAN TUJUAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PERENCANAAN PEMBANGUNAN DALAM PERPSEKTIF LINGKUNGAN, DAN PENDEKATAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

FUNGSI-FUNGSI DAN TUJUAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Perencanaan dalam arti seluas-luasnya adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Perencanaan adalah suatu cara bagaimana mencapai tujuan sebaik- baiknya (maximum output) dengan sumber-sumber yang ada agar lebih afisien dan efektif. Perencanaan adalah penentuan tujuan yang akan dicapai dilakukan, bagaimana, bilamana,dan oleh siapa.

Albert waterston menyebutkan perencanaan adalah melihat kedepan dengan mengambil pilihan berbagai alternatif dari kegiatan untuk mencapai tujuan masa depan tersebut dengan terus mengikuti agar supaya pelaksanaannya tidak menyimpang dari tujuan. Perencanaan pembangunan adalah suatu pengarahan penggunaan sumber-sumber (termasuk sumber- sumber ekonomi) yang terbatas adannya, untuk mencapai tujuan-tujuan keadaan sosial ekonomi yang lebih baik secara efisien dan afektif.

Perencanaaan pembangunan nasional adalah suatu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam **jangka panjang**, **jangka menengah**, dan **tahunan** yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan negara dan masyarakat ditingkat pusat dan daerah.

Dalam pasal 2 ayat (4) uu No. 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan Nasioanal, bahwa sistem perencanaan pembangunan nasional betujuan untuk :

a. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan

b. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu,

antar fungsi pemerintah maupun antar pusat dan daerah.

c. Menjamin keterkaitan dan konsistasi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

d. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat

e. Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DALAM PERPSEKTIF LINGKUNGAN

Rencana pembangunan dalam perspektif lingkungan telah ditegaskan dalam perencanaan formal (Rencana tata ruang) yang secara jelas membedakan wilayah budidaya dan kawasan lindung.

Wilayah budidaya terdiri atas kawasan-kawasan yang nantinya bisa di fungsikan sebgai kawasan komersil perumahan, perkantoran, dll. Sedangkan kawasan lindung diperuntukkan sebagai kawasan yang memiliki fungsi sebagai penyangga daerah resapan air, kawasan dengan kelerengan yang tinggi, cagar alam. Pengaturan penggunaan ruang itu kemudian juga telah diperkuat dengan regulasi-regulasi lainnya. Salah satunya yang berkaitan adalah perangkat hukum yang berisikan ketentuan-ketentuan pokok lingkungan hidup diawali dengan Undang-Undang No. 4 tahun 1982 lalu disempurnakan lagi menjadi UU No. 23 tahun 1997 Tentang pengelolaan lingkungan, dan instrumen pendukung seperti **Amdal** dan di ikuti dengan berbagai macam standar dan prosedur lainnya yang harus dipatuhi demi memperkokoh kedudukan lingkungan hidup kita.

Perencanaan pembangunan dalam perspektif lingkungan menurut **Eigles** (1984) memiliki dua komponen yaitu:

a. Sekumpulan alasan yang melihat tujuan perencanaan dari segi ekologi dan

pembangunan manusia

b. Seperangakat kriteria sebagai acuan dalam menilai pembangunan dari aspek etika ekologi dan etika social (Agus sjafri, 2017)

Menurut **Prof. Dr. Emil Salim** lingkungan hidup adalah segala benda dan kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati dan mempengaruhi hal- hal yang hidup termasuk kehidupan manusia. Pembangunan berwawasan lingkungan merupakan upaya sadar dan terencana yang mendukung unsur lingkungan hidup termasuk sumber daya kedalam proses pembangunan. Sumber daya yang mendukung pembangunan antara lain :

a. Sumber daya alam, yaitu air, tanah, dan udara

b. Sumber daya manuisia

c. Ilmu pengetahuan dan teknologi

Ciri-ciri pembangunan berwawasan lingkungan :

a. Menjamin pemerataan dan keadilan

b. Menghargai keanekaragaman hayati

c. Mengguanakan pendekatan integratif

d. Menggunakan pandangan jangka panjang pembangunan berwa- wasan lingkungan adalah pembangunan berkelanjutan yang mengoptimalkan mamfaat sumbern daya alam dan sumber daya manusia dengan cara menserasikan aktivitas manusia dengan kemampuan sumber daya alam untuk menopannya.

Roberts et al (1984) dalam bukunya **Planning and ekology**, mendefinisikan planning sebagai suatu aktivitas yang berkaitan dengan alokasi atau eksploitasi yang rasional dari sumber-sumber daya untuk kemaslahatan manusia baik jangka pendek maupun jangka panjang. Perencanaan pembangunan juga tidak bisa dilepaskan dari konsep hubungan antara sistem sosial (social system) dan lingkungan alam atau sistem ekologi (ecological system).

PENDEKATAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Menurut **senjaya** (2008), pendekatan merupakan sikap atau pandangan tentang suatu yang biasannya berupa asumsi atau seperangkat asumsi yang saling berkaitan. lebih lanjut **Bratakusumah** mengatakan bahwa, perencanaan adalah suatu proses terus menerus penggunaan sumber daya yang ada dengan sasaran untuk mencapai tujuan tertentu. Beberapa pendekatan perencanaan pembangunan yanitu :

a. Pendekatan politik adalah proses rencana pembangunan didasarkan

atas penjabarabaran visi dan misi program kepala daerah yang bersangkutan. Visi dan misi program calon kepala daerah menjadi Rencana pembangunan jangka menengah daerah, setelah calon kepala daerah tersebut terpilih. Hal ini merupakan instrumen pendekatan politik dalam perencanaan pembangunan.

b. Pendekatan teknokrat, adalah perencanaan pembangunan yang

dilaksanakan dengan menggunakan metode-metode dan kerangka berfikir ilmiah dan lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu.

c. Pendekatan partisipatif merupakan pandekatan perencanaan

pembangunan yang melibatkan seluruh lapisan masyrakat dalam merencanakan proses pembangunan. Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan mengakomodasi kepentingan mereka dalam proses panyusunan rencana pembangunan.

d. Pendfekatan TOP-DOWN, secara bahasa TOP-DOWN berarti Atas-Bawah, pendekatan dengan inisiatif organisasi /unit/ lembaga “ Atas” yang ditindak lanjuti diterjemahkan ke bawah.

e. Pendekatan BOTTOM-UP berarti Bawah-Atas adalah pendekatan perencanaan dengan inisiatif organisasi /unit/ lembaga bawah yang ditindak lanjuti (diterjemahkan) ke atas.

BAB 4 : TUJUAN DAN SASARAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

TUJUAN DAN SASARAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Berdasar UU Nomor 25 Tahun 2004

1. Mendukung Koordinasi Antar Pendukung Pembangunan
2. Menjamin Terciptanya Integrasi, Sinkronisasi, dan Sinergi Antar Daerah
3. Menjamin Keterkaitan dan Konsistensi Antara Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan dan Pengawasan
4. Mengoptimalkan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan
5. Menjamin Tercapainya Penggunaan Sumber Daya secara Efisien, Efektif, dan Adil

JENIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Menurut Jangka Waktunya

1. Perencanaan jangka Panjang (Long-term Planning/Perspective Planning)(20 tahun)
2. Perencanaan jangka Menengah (Medium-term Planning)(4-5 tahun)
3. Perencanaan jangka Pendek (Annual Planning)(1 tahun)

Berdasar Sifatnya

1. Perencanaan dengan Komando (Central Planning)
2. Perencanaan dengan Rangsangan (Planning By Insentives)

Berdasarkan Alokasi Sumber Daya

1. Perencanaan Keuangan
2. Perencanaan Fisik

Berdasarkan Tingkat Keluwesan

1. Perencanaan Indikatif
2. Perencanaan Imperatif

Berdasarkan Sistem Ekonomi

1. Perencanaan Pembangunan Dalam Sistem Kapitalis
2. Perencanaan Pembangunan Dalam Sistem Sosialis
3. Perencanaan Pembangunan Dalam Sistem Campuran

Berdasarkan Cara Pelaksanaanya

1. Perencanaan Sentralistik
2. Perencanaan Desentralistik

BAB 5 : TAHAPAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

TAHAPAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Secara umum terdapat empat tahap dalam proses pembangunan yang sekaligus juga menggambarkan tugas pokok badan perencana pembangunan.

1. **Tahap Penyusunan Rencana**
   Tahap awal kegiatan perencanaan adalah penyusunan naskah atau rancangan rencana pembangunan yang secara formal merupakan tanggung jawab badan perencana, baik BAPPENAS untuk tingkat nasional dan BAPPEDA untuk tingkat daerah. Penyusunan rencana ini dapat dilakukan secara swakelola oleh badan perencana sendiri atau dikontrakan kepada perusahaan konsultan yang relevan bila tenaga perencana yang terdapat pada badan perencana tidak mencukupi
2. **Tahap Penetapan Rencana**
   Rancangan rencana pembangunan yang telah selesai baru akan berlaku secara resmi bila telah mendapatkan pengesahan dari pihak yang berwenang. Sesuai ketentuan yang berlaku, RPJP perlu mendapat pengesahan dari DPRD setempat, sedangkan RPJM dan RKPD cukup mendapat pengesahan dari kepala daerah. Pada tahap kedua ini kegiatan utama badan perencana adalah melakukan proses untuk mendapatkan pengesahan tersebut.
3. **Tahap Pengendalian Pelaksanaan Rencana**
   Setelah rencana pembangunan tersebut ditetapkan oleh pihak yang berwenang, maka dimulai proses pelaksanaan rencana oleh pihak eksekutif melalui SKPD terkait. Namun demikian, sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, perencana masih tetap mempunyai tanggung jawab dalam melakukan pengendalian (monitoring) pelaksanaan rencana bersama SKPD bersangkutan.
4. **Tahap Evaluasi Keberhasilan Pelaksanaan Rencana**
   Setelah pelaksanaan kegiatan pembangunan selesai, badan perencana masih mempunyai tanggung jawab terakhir, yaitu melakukan evaluasi terhadap kinerja dari kegiatan pembangunan tersebut. Sasaran utama kegiatan evaluasi ini adalah untuk mengetahui apakah kegiatan dan obyek pembangunan yang telah selesai dilaksanakan tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

SIKLUS PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Perencanaan pembangunan mempunyai siklus (putaran kegiatan) yang terpola hampir secara seragam. Memperhatikan literatur perencanaan yang tersedia, secara umum terdapat 10 siklus

minimum perencanaan pembangunan yang perlu dilakukan dalam kegiatan perencanaan pembangunan sebagai berikut :

1. **Penilaian Keadaan Saat ini**
   Penyusunan perencanaan pembangunan selalu dimulai dengan penilaian terhadap kondisi umum negra atau daerah baik dibidang fisik dan sosial ekonomi saat ini (existing condition).
2. **Penilaian Arah Pembangunan Masa Datang**
   Kegiatan berikutnya yang perlu dilakukan adalah melakukan penilaian terhadap arah pembangunan dimasa datang. Penilaian ini biasanya dilakukan dengan jalan melakukan perkiraan (prediksi) secara terukur terhadap beberapa indikator dibidang ekonomi, sosial, fisik dan tata ruang.
3. **Formulasi Tujuan dan Sasaran Pembangunan**
   Siklus berikutnya yang perlu dilakukan adalah melakukan formulasi secara tepat tentang tujuan dan sasaran pembangunan. Tujuan pembangunan pada dasarnya adalah merupakan gambaran (deskripsi) tentang sasaran akhir yang ingin diwujudkan melalui kegiatan pembangunan. Sedangkan sasaran pembangunan adalah jabaran lebih konkret tentang tujuan pembangunan tersebut.
4. **Mengkaji Alternatif Strategi Pembangunan**
   Setelah tujuan dan sasaran pembangunan dapat dirumuskan secara tepat, maka langkah berikutnya adalah mengkaji berbagai alternatif strategi yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan tersebut.
5. **Menetapkan Prioritas Pembangunan**
   Prioritas pembangunan perlu dilakukan secara tajam agar pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan dapat dilakukan dengan kondisi dana yang terbatas.
6. **Merumuskan Kebijakan Pembangunan**
   Perumusan kebijakan ini harus dilakukan secara tepat sesuai dengan permasalahan pokok yang dihadapi serta tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan terdahulu.
7. **Identifikasi Program dan Kegiatan**
   Identifikasi terhadap program dan kegiatan yang diperlukan untuk dapat melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan terdahulu dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan.
8. **Menetapkan Perkiraan Dana Investasi Dibutuhkan**
   Setelah program dan kegiatan ditetapkan, maka siklus pekerjaan perencanaan berikutnya adalah menetapkan perkiraan dana investasi yang dibutuhkan.
9. **Menetapkan Indikator Kinerja**
   Penetapan indikator kinerja sangat penting artinya untuk dapat mengetahui secara konkret tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan.
10. **Penyusunan Rencana Tindak**
    Menyusun rencana tindak (action plan) yang berisikan berbagai ketentuan operasional dan cara yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan rencana, khusus progran dan kegiatan yang telah ditetapkan.

CIRI-CIRI PERENCANAAN YANG DIANGGAP BAIK

1. **Tersusun secara lengkap termasuk Sektor Swasta**
   Karena perencanaan pembangunan bersifat menyeluruh maka harus mencakup semua sektor (sektor pemerintah, sektor swasta dan masyarakat secara menyeluruh)
2. **Memasukan Evaluasi Perekonomian Masa Lalu**
   Mengingat pembangunan merupakan proses yang berkelanjutan yang berarti pembangunan yang akan direncanakan sangat ditentukan pula oleh hasil pembangunan yang telah dilakukan dimasa lalu. Evaluasi perekonomian dimasa lalu cukup dilakukan secara makro dengan memfokuskan perhatian pada struktur perekonomian, pertumbuhan ekonomi, dan potensi pembangunan yang dimiliki.
3. **Merinci Tujuan dan Prioritas Pembangunan**
   Penyusunan perencanaan yang baik memerlukan penetapan dan analisis yang jelas dan konkret tentang tujuan pembangunan yang ingin dicapai. Agar menjadi lebih operasional, maka tujuan pembangunan dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk prioritas pembangunan. Prioritas pembangunan ditetapkan dalam rangka untuk lebih mengoptimalkan pencapaian sasaran pembangunan dengan memperhatikan keterbatasan dana dan sumber daya pembangunan lainnya yang tersedia.
4. **Menerjemahkan Tujuan ke dalam Target Pembangunan**
   Perencanaan yang baik haruslah terarah dan terukur sehingga sasaran pembangunan menjadi jelas dan dapat dimonitor dan dievaluasi di kemudian hari untuk mengetahui tingkat capaian yang dapat dihasilkan.
5. **Strategi dan Kebijakan Bersifat Spesifik**
   Strategi dan kebijakan yang dirumuskan bersifat spesifik sesuai kondisi, potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh negara dan daerah bersangkutan.
6. **Berisikan Perencanaan Kebutuhan Investasi**
   Perencanaan dan penganggaran merupakan dua aspek yang sangat terkait satu sama lainnya. Oleh karena itu perencanaan yang dipersiapkan dengan baik harus memuat perkiraan jumlah investasi yang diperlukan untuk dapat mencapai sasaran dan target pembangunan yang telah ditetapkan semula.
7. **Memuat Proyeksi Selama Periode Perencanaan**
   Terdapat proyeksi (perkiraan) masa datang, yang juga dapat berfungsi sebagai sasaran dan target pembangunan secara kuantitatif
8. **Mempunyai Kaitan yang Jelas Dengan Perencanaan Pembangunan lainnya**
   Dalam rangka mewujudkan perencanaan yang terpadu dan bersinergi antar daerah dan tingkat pemerintahan, maka pada perencanaan yang dipersiapkan dengan baik terlihat dengan jelas kaitan dan hubungan antara satu dokumen perencanaan dengan dokumen perencanaan lainnya yang terkait.

BAB 6 : UNSUR POKOK PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

UNSUR POKOK PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

1. **KONDISI UMUM DAERAH**
   a. Penyusunan setiap dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah biasanya selalu dimulai dengan analisis tentang kondisi umum (existing condition) dari negara atau daerah bersangkutan
   b. Analisis tentang kondisi umum daerah meliputi aspek geografis, sumber daya alam, agama dan budaya, penduduk dan sumber daya manusia, potensi ekonomi daerah, hukum dan pemerintahan dll

2. **VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH**
   a. VISI pada dasarnya adalah kondisi obyektif yang dicita-citakan dapat diwujudkan dimasa depan oleh seluruh lapisan masyarakat pada periode waktu tertentu
   b. Menurut BRYSON (1995) VISI dapat didefinisikan sebagai kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang setelah mengimplementasikan strategi dan kegiatan pembangunan
   c. MISI pada dasarnya merupakan cara dan upaya umum dan bersifat pokok yang akan dilakukan dalam mewujudkan dan merealisasikan VISI yang telah ditetapkan.

3. **SASARAN DAN TARGET PEMBANGUNAN DAERAH**
   a. Perencanaan yang baik seharusnya mempunyai sasaran dan target pembangunan secara jelas untuk periode waktu tertentu
   b. Sasaran pada dasarnya adalah bentuk konkret dari tujuan yang ingin dicapai melalui pelaksanaan pembangunan sesuai yang direncanakan
   c. Target adalah sasaran lebih konkret dan spesifik lagi dalam bentuk kuantitatif yang harus dicapai pada waktu tertentu

4. **STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH**
   a. SPD pada dasarnya merupakan cara atau jalan terbaik untuk dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan
   b. Tentunya penetapan strategi yang tepat untuk suatu Negara dan daerah akan sangat ditentukan oleh kondisi, potensi yang dimiliki dan permasalahan pokok yang dihadapi oleh Negara atau daerah tersebut

5. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

a. KPD pada dasarnya merupakan pengambilan keputusan oleh pimpinan atau elite politik daerah untuk mewujudkan kondisi yang dapat mendorong dan mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam perencanaan
b. Perumusan KPD perlu dilakukan secara hati-hati dengan memperhatikan berbagai aspek penting seperti : VISI dan MISI pembangunan, kondisi dan potensi daerah, permasalahan pokok pembangunan dan proyeksi pembangunan kedepan

6. PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

a. PPD pada dasarnya diperlukan dalam rangka mengoptimalkan pencapaian sasaran pembangunan daerah dengan dana dan sumber daya yang terbatas
b. Penetapan PPD perlu dilakukan secara hati-hati agar perencanaan menjadi lebih terarah dan tepat sehingga upaya untuk pencapaian sasaran pembangunan dapat dilakukan secara efektif dan efisien

7. PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH

a. PKPD pada dasarnya merupakan upaya dan tindakan konkret dalam bentuk intervensi pemerintah dengan menggunakan sejumlah sumber daya, termasuk dana dan tenaga, yang dilakukan dalam rangka melaksanakan kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan
b. PKPD merupakan jabaran konkret dari strategi dan kebijakan yang mempunyai tujuan dan sasaran tertentu dalam rangka mendorong proses pembangunan daerah

8. INDIKATOR KINERJA

a. Berdasarkan konsep ilmu Indikator Kerja dapat ditetapkan dalam 5 unsur yaitu:
    i. Masukan (input)
    ii. Keluaran (output)
    iii. Hasil (outcome)
    iv. Manfaat (benefit)
    v. Dampak (impact)

b. Unsur masukan yang lazim digunakan dalam penilaian kerja pelaksanaan pembangunan adalah :
    i. Dalam bentuk penggunaan (penyerapan) dana atau tenaga kerja
    ii. Keluaran adalah produk langsung dari pelaksanaan program dan kegiatan tersebut
    iii. Hasil adalah tingkat penggunaan dari keluaran tersebut oleh masyarakat sehingga bermanfaat bagi kegiatan pembangunan
    iv. Manfaat adalah konstribusi dari pelaksanaan program dan kegiatan tersebut terhadap proses pembangunan

v. Dampak adalah pengaruh yang timbul sebagai hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan tersebut terhadap pembangunan

BAB 7 : RUANG LINGKUP DAN BENTUK PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

RUANG LINGKUP DAN BENTUK PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Secara umum ada empat ruang lingkup dan bentuk perencanaan pembangunan yang satu sama lainnya saling berkaitan :

1. **PERENCANAAN MAKRO** (adalah perencanaan pembangunan nasional dalam skala makro atau menyeluruh). Yang analisisnya bersifat menyeluruh (agregatif) meliputi kesemua aspek dan sector pembangunan
   Aspek-aspek yang dibahas dalam Perencanaan Makro ini meliputi :
   1. **Pertumbuhan Ekonomi Daerah** (Aspek makro pertama yang sangat penting dibahas adalah menyangkut dengan pertumbuhan ekonomi daerah yang pada dasarnya merupakan peningkatan kemampuan produksi yang terdapat pada daerah yang bersangkutan)
   2. **Pemerataan Pembangunan Ekonomi Daerah** (pertumbuhan ekonomi yang cepat, tetapi tidak diikuti dengan pemerataan akan mengurangi tingkat kemakmuran masyarakat dan dapat menimbulkan kecemburuan social, sehingga dapat mendorong timbulnya keresahan dan ketegangan politik)
   3. **Kemakmuran dan Kesejahteraan Masyarakat** (sesuai dengan tujuan nasional dan daerah, aspek kemakmuran adalah salah sasaran akhir dari proses pembangunan pada suatu daerah)
   4. **Sumber Pembiayaan Pembangunan** (upaya pembangunan daerah baru akan dapat dilaksanakan bilamana terdapat sumber pembiayaan yang cukup, baik yang berasal dari pemerintah maupun swasta dan masyarakat). Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, dewasa ini terdapat tiga sumber keuangan dan pembiayaan Pembangunan daerah yaitu :
      a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
      b. Dana Perimbangan yang berasal dari Pemerintah Pusat dan
      c. Lain-lain pendapatan yang sah sesuai ketentuan yang berlaku seperti hasil retribusi daerah dan laba bersih dari kegiatan badan usaha milik daerah (BUMD)
   5. **Perkiraan Kebutuhan Investasi** (sebagai dasar untuk penyusunan rencana investasi baik secara menyeluruh maupun sektoral)

6. **Strategi dan Kebijakan Pembangunan Daerah** (selain harus sesuai dengan visi dan misi, harus pula disesuaikan dengan kondisi, permasalahan pokok dan potensi pembangunan utama yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan)

2. **PERENCANAAN SEKTORAL** (adalah perencanaan yang dilakukan dengan pendekatan berdasarkan sector). Yang menyangkut hanya satu bidang atau sector tertentu saja seperti pertanian, pendidikan, kesehatan, perindustrian, perdagangan dll.
   Karena diperuntukan khusus untuk dinas atau SKPD tertentu, maka penyusunannya harus mengacu pada Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) institusi bersangkutan. Karena itu, tentunya isi dari perencanaan sektoral tersebut akan berbeda satu sama lainnya sesuai dengan kegiatan dinas dan instansi yang menyusunnya. Namun demikian, arah umumnya harus sesuai dan mendukung visi dan misi dari kepala daerah terpilih yang tercantum dalam RPJMD daerah bersangkutan. Komponen perencanaan sektoral ini pada dasarnya adalah sangat mirip dengan Perencanaan Makro.

3. **PERENCANAAN WILAYAH** (regional) (adalah perencanaan yang menitik beratkan pada aspek lokasi tempat kegiatan dilakukan). Yang mencakup hanya untuk wilayah administratif tertentu saja seperti provinsi, kabupaten dan kota.
   Perencanaan Wilayah (regional) pada dasarnya adalah ruang lingkup dan bentuk perencanaan pembangunan yang didalamnya terdapat unsur tata-ruang dan lokasi kegiatan ekonomi dan sosial secara terintegrasi. Jenis perencanaan ini sering kali pula disebut dengan Spatial (Regional Development Planning) dimana seluruh unsur dan variabel pembangunan dirinci menurut aspek ruang dan lokasinya. Terdapat dua undang-undang yang melandasi perlunya disusun perencanaan wilayah (regional) tersebut. Keduanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang. Untuk perencanaan pembangunan tingkat propinsi dan kabupaten, Undang-Undang Lingkungan Hidup menjadi lebih penting karena aspek tata ruang masih dalam bentuk umum. Sedangkan perencanaan pembangunan pada tingkat kota dimana aspek tata ruang lebih menonjol, maka Undang-Undang Tata Ruang akan menjadi lebih berperan dan mengikat.

   Tujuan utama perencanaan wilayah (regional) secara khusus adalah :
   1. Mendorong proses pembangunan daerah bersangkutan
   2. Mendorong proses pembangunan khusus untuk daerah tertinggal
   3. Mengurangi ketimpangan pembangunan antar wilayah
   4. Meningkatkan daya dukung lingkungan
   5. Meningkatkan efisiensi penggunaan lahan, dan
   6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup daerah bersangkutan.

Perencanaan pembangunan wilayah ternyata mempunyai karakteristik khusus bila dibandingkan dengan perencanaan pembangunan secara umum. Kareakteristik tersebut antara lain :

1. Terkandung unsur tata ruang dan lokasi kegiatan secara terintegrasi
2. Disusun sesuai dengan kondisi, potensi, dan permasalahan daerah setempat
3. Terpadu antar sektoral dan antar wilayah
4. Mempertimbangkan aspek daya dukung lahan dan lingkungan hidup, serta
5. Menonjolkan peranan pemerintah daerah dalam mendorong proses pembangunan di daerahnya masing-masing.

4. **PERENCANAAN PROYEK** (kegiatan) atau perencanaan Mikro (adalah perencanaan skala terperinci dalam perencanaan tahunan, yang merupakan penjabaran rencana-rencana baik makro, sektoral, maupun wilayah/regional kedalam susunan proyek-proyek dan kegitan-kegiatan dengan berbagai dokumen perencanaan dan penganggarannya). Yang mencakup perencanaan untuk membangun suatu proyek atau kegiatan tertentu saja seperti pembangunan jalan, pembangkit tenaga listrik, sekolah, rumah sakit, dan lain-lainnya.

   Tiga kriteria yang harus dipenuhi untuk penilaian kelayakan suatu proyek atau kegiatan yaitu sebagai berikut :

   1. Benefit-Cost Ratio, B/C ratio) >1 artinya manfaat proyek lebih besar dari biaya yang harus dikeluarkan sehingga pembangunan proyek tersebut tidak akan memboroskan keungan negara atau daerah
   2. Net Present Values, NPV > 0 artinya nilai rupiah manfaat lebih besar dari nilai rupiah biaya yang diperlukan sehingga manfaat yang diperoleh lebih besar dari pengorbanan yang harus dikeluarkan pemerintah
   3. Internal Rate of Return, IRR > dari bunga deposito artinya hasil keuntungan yang diperoleh dari pembangunan proyek harus lebih besar dari tingkat bunga deposito. Bila tidak maka akan lebih menguntungkan bila dana tersebut disimpan di Bank daripada diinvestasikan pada proyek bersangkutan.

   Tahapan siklus proyek atau kegiatan sebagai berikut :

   1. Tahap Identifikasi, yang merupakan identifikasi kebutuhan pembangunan proyek sesuai dengan kebutuhan daerah atau rencana yang ditetapkan semula seperti RPJMD
   2. Tahap Persiapan Proyek, yang berisikan penelitian terhadap faktor-faktor yang menentukan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan proyek bersangkutan
   3. Tahap Pelaksanaan, yang meliputi berbagai kegiatan yang menyangkut dengan konstruksi pembangunan atau pengadaan fisik proyek bersangkutan
   4. Tahap Evaluasi, yang melaksanakan kegiatan evaluasi kinerja proyek terhadap pembangunan daerah dengan menggunakan data-data hasil pelaksanaan operasional proyek

BAB 8 : UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS)

UNIVERSITAS JAYABAYA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA

UJIAN TENGAH SEMESTER GANJIL (UTS)

TAHUN AKADEMIK 2021/2022

MATA KULIAH : PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DOSEN : DRS.DERADJAT M. SASOKO, MM
HARI/TANGGAL : KAMIS 28 OKTOBER 2021
WAKTU : 90 MENIT
RUANG : ONLINE/WAG

KERJAKAN DENGAN TELITI DAN BENAR

SOAL :

1. Sebutkan dan Jelaskan latar belakang munculnya Ilmu Perencanaan Pembangunan
2. Sebutkan dan Jelaskan beberapa hal dibawah ini yang saudara ketahui
    a. Definisi Perencanaan
    b. Definisi Perencanaan Pembangunan
    c. Tahapan Perencanaan Pembangunan
    d. Visi dan Misi Pembanguan Daerah
3. Sebutkan dan Jelaskan Ruang Lingkup dan Bentuk Perencanaan Pembangunan Daerah
4. Sejak Tahun 2005, Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan di Indonesia mengalami perubahan yang cukup penting dan mendasar. Perubahan tersebut terjadi dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).

Berikan gambaran secara ringkas tentang konsep dan prinsip pokok yang berkaitan dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah.

====SELAMAT MENGERJAKAN====

BAB 9 : SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DAN DAERAH

SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DAN DAERAH

Sejak tahun 2005 yang lalu, pelaksanaan perencanaan pembangunan di Indonesia mengalami perubahan yang cukup penting dan mendasar. Perubahan terjadi dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (SPPN). Perubahan ini dilakukan terutama untuk memperbaiki kelemahan dan kekurangan yang masih dirasakan selama ini.

Sesuai dengan SPPN 2004, Perencanaan Pembangunan didefinisikan sebagai suatu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara Negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.

KONSEP DAN PRINSIP POKOK YANG BERKAITAN DENGAN SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DAN DAERAH

1.PERMASALAHAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI INDONESIA

Memperhatikan pengalaman masa lalu dan perkembangannya yang terjadi di Indonesia dewasa ini, terlihat adanya beberapa permasalahan pokok dalam perencanaan pembangunan di Indonesia. Permasalahan ini timbul baik dalam penyusunan rencana, maupun dalam pelaksanaannya. Disamping itu terjadi pula beberapa perubahan peraturan dan perundangan berlaku yang membawa implikasi terhadap penyusunan rencana pembangunan. Kesemua permasalahan dan perubahan merupakan dasar dan latar belakang utama keluarnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SPPN.

Permasalahan Pertama adalah adanya perubahan yang cukup fundamental tentang ketentuan MPR yang tidak lagi bertugas menyusun GBHN, yang mana didalam GBHN terdapat Garis besar pembangunan jangka panjang yang merupakan acuan utama dalam penyusunan rencana pembangunan baik tingkat pusat maupun daerah.

Permasalahan Kedua adalah masih sangat dirasakan adanya “ ego sektoral “ antara para aparat pemerintah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan.

Permasalahan Ketiga adalah kurang terpadunya antara perencanaan dan penganggaran

Permasalahan Keempat adalah belum optimalnya peran serta masyarakat dalam proses penyusunan rencana pembangunan sehingga kebanyakan perencanaan yang disusun masih bersifat " Top-Down Planning "

2. SASARAN POKOK SPPN

1. Meningkatkan koordinasi antar pelaku pembangunan sehingga hasil yang diharapkan menjadi lebih optimal
2. Meningkatkan keterpaduan dan sinergitas perencanaan antara pusat dan daerah serta antar daerah yang terkait
3. Meningkatkan keterpaduan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan
4. Mengoptimalkan partisipasi dan peran serta masyarakat dalam penyusunan dan pelaksanaan perencanaan pembangunan
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, dan adil

3. DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
   1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
   2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
   3. Rencana Strategis Institusi (Renstra SKPD)
   4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
   5. Rencana Kerja Institusi (Renja SKPD)

4. KETERKAITAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Didalam SPPN 2004 upaya untuk meningkatkan keterpaduan dan sinergitas pembangunan nasional dilakukan dengan jalan menciptakan keterkaitan antara dokumen perencanaan pembangunan yang disusun oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah , mulai dari RPJP sampai dengan Renja SKPD antara tingkat nasional dan daerah.

5. MEKANISME PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN

Mekanisne perencanaan menyangkut dengan prosedur pelaksanaan, instansi terlibat, jadwal pelaksanaan dan pejabat yang berwenang menetapkan dokumen perencanaan.

6. PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Dalam rangka mewujudkan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga telah melakukan perubahan yang cukup penting. Perubahan tersebut menyangkut dengan penyusunan anggaran yang dewasa ini didasarkan pada rencana tahunan. Sebelumnya, untuk tingkat nasional anggaran didasarkan pada Program Perencanaan Pembangunan Nasional (PROPENAS). Sedangkan untuk tingkat daerah, penyusunan anggaran tersebut dilakukan berdasarkan Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) atau Rencana Strategis Daerah (Renstrada) yang disusun sekali dalam 5 tahun. Karena rencana pembangunan adalah untuk 5 tahun, maka sifatnya menjadi lebih umum, sedangkan anggaran yang bersifat tahunan memerlukan program dan kegiatan yang rinci.

Akhirnya penyusunan anggaran mengalami kesulitan dan cenderung tidak sinkron dengan perencanaan yang telah disusun.
Dalam rangka keterpaduan antara penyusunan perencanaan dan penganggaran, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2005 menggariskan beberapa prosedur dan langkah yang harus ditempuh dalam proses penyusunan anggaran, baik pada tingkat nasional maupun daerah. Langkah-langkah tersebut menyangkut dengan penyusunan dolumen berikut ini : (a) Kebijakan Umum Anggaran (KUA), (b) Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara (PPAS), (c) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA). Disamping itu, diwajibkan pula menyusun Anggaran Kinerja (Performance Budget) agar alokasi dana menjadi lebih terarah sesuai dengan capaian kinerja yang diharapkan sebagaimana yang tertera dalam rencana tahunan.

7. PENGENDALIAN (MONITORING) DAN EVALUASI

   SPPN 2004 mengamanatkan pula bahwa tahapan perencanaan pembangunan meliputi empat hal yaitu : (a) Penyusunan Neraca (b) Penetapan Rencana (c) Pengendalian (monitoring) pelaksanaan rencana, dan (d) Evaluasi pelaksanaan rencana

   Dengan demikian, terlihat tugas badan perencana pembangunan bukan hanya meliputi kegiatan penyusunan dan penetapan rencana saja, tetapi juga sampai pada kegiatan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana tersebut.

8. PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DENGAN DAERAH

Secara umum ada 4 hal pokok yang menjadi dasar pertimbangan utama yang menyebabkan perlunya masing-masing daerah menyusun perencanaannya sendiri. Ke 4 hal tersebut adalah sbb :

1. Struktur pembangunan daerah berbeda dengan struktur pembangunan nasional
2. Pada pembangunan daerah terdapat interaksi yang erat dengan daerah lainnya baik dalam hal perdagangan, perpindahan penduduk, dan mobilitas modal
3. Struktur dan komponen keuangan daerah berbeda dengan keuangan nasional
4. Ruang lingkup kewenangan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan pembangunan daerah berbeda dengan lingkup kewenangan Pemerintah Pusat.

BAB 10 : PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM ERA OTONOMI

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM ERA OTONOMI

Pada tanggal 1 Januari 2001, Pemerintah Republik Indonesia secara resmi telah menyatakan dimulainya pelaksanaan Otonomi Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 **tentang Pemerintahan Daerah** dan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 **tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah**

Sejak mulai saat itu, pemerintahan dan pembangunan daerah diseluruh nusantara telah memasuki era baru, yaitu era otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Sistem pemerintahan dan pembangunan daerah lama yang sangat sentralisasi dan didominasi oleh pemerintah pusat mulai ditinggalkan. Sedangkan pemerintah daerah diberikan wewenang dan sumber keuangan baru untuk mendorong proses pembangunan didaerahnya masing-masing yang selanjutnya akan mendorong pula proses pembangunan nasional.

Perubahan sistem pemerintahan dan pengelolaan pembangunan daerah tersebut tentunya akan menimbulkan perubahan yang cukup mendasar dalam perencanaan pembangunan daerah. Sistem perencanaan daerah yang sebelumnya cenderung seragam, mulai berubah dan cenderung bervariasi tergantung pada potensi dan permasalahan pokok yang dialami oleh daerah yang bersangkutan. Kebijaksanaan pembangunan daerah yang selama ini hanya merupakan pendukung dari kebijaksanaan nasional, mulai mengalami perubahan sesuai dengan keinginan dan aspirasi yang berkembang di daerah. Keadaan demikian menyebabkan, pola dan sistem perencanaan pembangunan daerah dalam era otonomi daerah juga mengalami perubahan cukup penting dibandingkan dengan apa yang telah kita alami dalam era sentralisasi pada pemerintahan orde baru yang lalu.

A. KONSEP OTONOMI DAERAH

Perkataan otonomi berasal dari bahasa Yunani Outonomous, yang berarti pengaturan sendiri atau pengaturan sendiri. Menurut Encyclopedia of Social Science, pengertian otonomi adalah the legal self sufficiency of social body and its actual independence. Dengan demikian, pengertian ekonomi menyangkut dengan dua hal pokok yaitu : (1) kewenangnan untuk membuat hukum sendiri (own laws) dan (2) kebebasan untuk mengatur pemerintahan sendiri (self government). Berdasarkan pengertian tersebut, maka otonomi daerah pada hakikatnya adalah hak atau wewenang untuk mengurus rumah

tangga sendiri bagi suatu daerah otonom (Sarundajang, 2000). Hak atau wewenang tersebut meliputi pengaturan pemerintah dan pengelolaan pembangunan yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Ada tiga alasan pokok mengapa diperlukan otonomi daerah tersebut (Hidayat Syarief, 2000) :

Pertama, Political Equality yaitu guna meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada tingkat daerah. Hal ini penting artinya untuk meningkatkan partisipasi demokratisasi dalam pengelolaan negara

Kedua, adalah Local Accountability yaitu meningkatkan kemampuan dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam mewujudkan hak dan aspirasi masyarakat daerah. Hal ini sangat penting artinya dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial di masing-masing daerah.

Ketiga, adalah Local Responsiveness yaitu meningkatkan respons pemerintah daerah terhadap masalah-masalah sosial ekonomi yang terjadi di daerahnya. Unsur ini sangat penting bagi peningkatan upaya pembangunan dan peningkatan kesejahteraan sosial di daerah.

1. DESENTRALISASI PEMBANGUNAN

   Undang-undang nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-undang nomor 5 Tahun 1974. Dalam undang-undang baru ini Otonomi daerah diusahakan untuk terwujud melalui pemberian wewenang yang lebih besar kepada daerah terutama kabupaten dan kota.

   Sedangkan pemerintah pusat hanya dibatasi dilima sektor :

   a. Pertahanan dan Keamanan
   b. Politik Luar Negeri
   c. Fiskal dan Moneter
   d. Peradilan dan
   e. Agama

   Sedangkan provinsi diberikan otonomi terbatas dalam pengelolaan pembangunan yang bersifat lintas kabupaten dan kota yang meliputi sektor :

   a. Perkebunan
   b. Perhubungan
   c. Pekerjaan umum dan
   d. Kehutanan

Kegiatan pembangunan selain yang diberikan kepada pemerintah Pusat dan Provinsi menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2000 merinci secara tegas dan konkret pembagian kewenangan tersebut

2. DESENTRALISASI FISKAL

   Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah guna mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah. Pemerintah memberikan alokasi keuangan baru untuk daerah yang dinamakan Dana Perimbangang. Dana perimbangan terdiri dari :

a. Bagian untuk daerah dari hasil pemasukan dari pengelolaan sumber daya alam
b. Dana Alokasi Umum (DAU)
c. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Disamping itu, pemerintah daerah dibolehkan pula melakukan pinjaman luar negeri sepanjang memenuhi ketentuan yang ditetapkan pemerintah pusat.

Selanjutnya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 juga melakukan desentralisasi fiskal dimana pemerintah daerah diberikan wewenang pengelolaan pengeluaran keuangan yang lebih besar sesuai dengan potensi dan kebutuhan daerah.

B. REORIENTASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Dalam era otonomi daerah orientasi perencanaan pembangunan daerah akan mengalami perubahan cukup mendasar dan peranannya menjadi semakin penting.

1. SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
   Karena dalam era otonomi daerah, campur tangan pemerintah pusat menjadi semakin berkurang dan daerah diberikan wewenang yang lebih besar untuk mengelola pembangunan didaerahnya masing-masing, maka sistem perencanaan pembangunan daerah yang semula lebih bersifat sektoral, kemudian berubah menjadi lebih bersifat regional. Perencanaan pembangunan daerah sekarang lebih banyak memperhatikan potensi dan kharakteristik khusus daerah. Perencanaan Nasional lebih bersifat makro dan hanya memberikan arah dan sasaran umum agar pembangunan daerah dapat dikoordinasikan dengan baik dan efisien.
2. PENERAPAN KONSEP WILAYAH PEMBANGUNAN
   Salah satu kharakteristik penting dari konsep perencanaan wilayah adalah mempertimbangkan sebanyak mungkin variasi kondisi sosial ekonomi daerah ke dalam perencanaan. Hal ini sangat penting artinya karena variasi dalam kondisi sosial ekonomi antar daerah adalah cukup besar, sebagaimana halnya juga di Indonesia.
3. PENETAPAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH
   Proses penetapan program dan kegiatan pembangunan daerah yang akan dibiayai dan dilaksanakan pada setiap tahun anggaran dilakukan penilaian dan penyeleksiannya melalui Rapat Koordinasi Pembangunan (RaKorBang) yang dimulai dari tingkat pemerintahan paling bawah yaitu desa.
4. PERANAN BAPPEDA
   Perubahan sistem perencanaan pembangunan daerah dalam era otonomi, tentunya memerlukan lembaga perencana pembangunan yang lebih kuat dan berkualitas. Perlu terobosan dilakukan untuk meningkatkan jumlah dan kualitas tenaga perencana pada semua BAPPEDA yang ada di daerah.

C. SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (SPPN 2004)

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN 2004) pada dasarnya dikeluarkan pemerintah untuk memperbaiki berbagai kelemahan perencanaan pembangunan yang dirasakan di masa lalu. Sasaran perbaikan yang diharapkan antara lain adalah mewujudkan keterpaduan dan sinergi pembangunan antar dinas dan instansi dan antar daerah, keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran serta untuk lebih mengoptimalkan pemanfaatan partisipasi masyarakat dalam penyusunan perencanaan.

1. KETERPADUAN DAN SINERGI PEMBANGUNAN
2. PERENCANAAN WILAYAH DAN PERENCANAAN INSTITUSI
3. KOORDINASI DAN PENYERAPAN PARTISIPASI MASYARAKAT
4. PERANAN RENCANA TAHUNAN
5. PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

D. KOMPLIKASI OTONOMI DAERAH TERHADAP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Setelah Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sesuai Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 efektif dilaksanakan sejak tahun 2005, mulai dirasakan adanya berbagai komplikasi dalam pelaksanakan perencanaan pembangunan daerah yang disebabkan oleh pelaksanaan demokratisasi dan otonomi daerah. Penerapan proses demokratisasi menyebabkan penyusunan rencana pembangunan harus dilakukan dengan lebih memperhatikan keinginan dan aspirasi masyarakat yang sering berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Sedangkan penerapan otonomi daerah memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah untuk menentukan arah dan kebijakan pembangunan untuk daerahnya masing-masing. Kedua hal ini menyebabkan timbulnya variasi yang sangat besar dalam penyusunan perencanaan pembangunan di masing-masing daerah. Sementara itu, penerapan sistem Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) cenderung menyebabkan arah pembangunan daerah menjadi sangat bervariasi sesuai dengan Visi dan Misi kepala daerah terpilih. Kesemuanya ini menyebabkan koordinasi dan konsistensi dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah secara nasional sulit dilakukan.

1. KONSISTENSI VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH
2. KETIDAKSINKRONAN JADWAL WAKTU PERENCANAAN
3. INKONSISTENSI ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN

BAB 11 : PERENCANAAN DAN PELAKSANAANNYA

PERENCANAAN DAN PELAKSANAANNYA

Baik buruknya sebuah perencanaan pembangunan sangat ditentukan oleh seberapa jauh perencanaan tersebut dapat dilaksanakan dalam praktik.

Suatu perencanaan pembangunan dikatakan baik dan berkualitas bilamana

rencana yang telah disusun tersebut dapat terlaksana dan berjalan dengan baik walaupun secara teknis dan akademis tidak terlalu istimewa.

Sedangkan suatu perencanaan dikatakan kurang baik bahkan buruk bilamana rencana tersebut tidak dapat dilaksanakan dalam praktik, walaupun secara teknis dan akademis sangat menonjol.

A. PERSYARATAN UNTUK TERJAMINNYA PELAKSANAAN RENCANA

Untuk dapat lebih terjaminnya pelaksanaan suatu perencanaan pembangunan diperlukan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi .

1. *PERENCANAAN HARUS BERORIENTASI PADA PELAKSANAAN*
   Untuk dapat mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi pada pelaksanaan, maka hal yang pertama yang perlu diusahakan antara lain adalah perlunya dukungan elite politik yang terdapat di daerah bersangkutan. Elite Politik tersebut meliputi Pimpinan Daerah, Pimpinan Dinas dan Instansi, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat.
2. *PERLU ADANYA STABILITAS POLITIK*
   Terdapatnya Stabilitas Politik, baik pada tingkat Nasional maupun Daerah, merupakan unsur lain yang diperlukan untuk dapat terjaminnya pelaksanaan suatu perencanaan pembangunan
3. *PERENCANAAN ITU SENDIRI HARUS LAYAK SECARA TEKNIS*
   Perencanaan Pembanguanan yang diperkirakan akan terjamin pelaksanaannya dilapangan adalah perencanaan yang secara teknis layak dan operasional. Ini berarti bahwa perencanaan yang sasaran dan targetnya tidak muluk-muluk dan sesuai dengan kondisi dan kemampuan keuangan dan sumber daya daerah bersangkutan dan sejalan dengan aspirasi masyarakat setempat secara keseluruhan
4. *KEMAMPUAN ADMINISTRASI DAERAH BERSANGKUTAN*

Kesuksesan pelaksanaan suatu perencanaan pembangunan akan sangat ditentukan pula oleh kemampuan administrasi yang terdapat pada daerah bersangkutan

5. *MELAKUKAN PENYESUAIAN RENCANA (PLANNING ADJUSTMENT)*
   Bahwa perencanaan harus selalu dapat disesuaikan dengan perubahan situasi dan kondisi daerah bersangkutan
6. *MENJAGA KONSISTENSI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN*
   Harus menjaga konsistensi antara penyusunan anggaran dengan dokumen perencanaan yang sudah ada, terutama Rencana Kerja Pemerintah Daerah
7. *OPTIMALISASI PERAN SERTA MASYARAKAT*
   Bilamana perencanaan dilakukan sesuai dengan aspirasi masyarakat umum, maka kemungkinan protes dari masyarakat akan sangat kecil
8. *MELAKUKAN MONITORING DAN EVALUASI*
   Dalam praktiknya kedua kegiatan ini seringkali disatukan yang lazim dikenal dengan istilah MONITORING AND EVALUATION (MONEV). Kedua kegiatan ini sangat penting dilakukan untuk dapat menjamin agar apa yang telah direncanakan semula akan dapat dilaksanakan secara baik di lapangan, sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat

B. KEGAGALAN TEKNIS PERENCANAAN

Secara umum terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kegagalan rencana (Planning Failure)

1. *DUALISME POLA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RENCANA*
   Permasalahan utama yang dewasa ini cukup serius adalah terdapat dualisme dalam pola penyusunan dan penetapan rencana pembangunan yang cenderung menimbulkan kebingungan dalam penyusunan dokumen rencana pada tingkat daerah. Dualisme dalam pola penyusunan rencana khususnya terjadi pada penyiapan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD). Antara Bappenas sebagai Otoritas Perencanaan pada Tingkat Nasional (sesuai dengan UU nomor 25 Tahun 2004) dengan Depdagri yang mengeluarkan pola penyusunan rencana pembangunan untuk tingkat daerah (sesuai Permendagri nomor 54 Tahun 2010, yang disusun berdasar PP nomor 8 Tahun 2008). Untuk dapat mengintegrasikan RPJMD dan RTRW pola Bappenas membuat suatu bab khusus dengan judul Pembangunan Wilayah. Pada bab ini dimasukan unsur lokasi dan tata ruang wilayah kedalam RPJM dengan memanfaatkan RTRW yang telah ada pada daerah yang bersangkutan
2. *ARAH PEMBANGUNAN DAERAH KURANG REALISTIS*
   Dapat terjadi bila :
   i. Arah pembangunan yang dirumuskan kurang Realistis bila dibandingkan dengan kondisi riil daerah bersangkutan
   ii. Target-target Pembangunan yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan terlalu tinggi dan tidak sesuai dengan kemampuan daerah bersangkutan
3. *KELEMAHAN TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA*
   Kondisi ini biasanya muncul karena keterbatasan jumlah dan kualitas tenaga perencana

4. *KETERBATASAN DATA STATISTIK TERSEDIA*
   Perencanaan yang layak secara teknis akan didapatkan bila ada data statistik yang cukup dengan tingkat akurasi yang memadai
5. *KURANG TERPADUNYA PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN*
   Keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran adalah merupakan persyaratan penting untuk dapat menjamin terlaksananya semua program dan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan apa yang telah direncanakan
6. *ADANYA GONCANGAN PEREKONOMIAN DAN BENCANA ALAM*
   Bisa terjadi karena krisis ekonomi baik secara nasional ataupun datang dari negara lain, dan juga bisa karena bencana alam
7. *STRUKTUR BADAN PERENCANA PEMBANGUNAN DAERAH*
   Kegagalan rencana dapat disebabkan oleh struktur badan perencana sendiri, bila tenaga perencana yang bekerja pada badan ini jumlahnya kurang memenuhi

C. KEGAGALAN PELAKSANAAN RENCANA

Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan

1. *KURANGNYA DUKUNGAN ELITE POLITIK BERKUASA*
   Karena pelaksanaan rencana pembangunan banyak tergantung pada dukungan dan keputusan dari elite politik yang berkuasa
2. *KURANG SEMPURNANYA PENYUSUNAN ANGGARAN KINERJA*
   Dalam rangka menjaga keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran, pemerintah daerah dituntut oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 untuk menyusun Anggaran Kinerja (Performance Budget)
3. *KURANG OPTIMALNYA PEMANFAATAN PARTISIPASI MASYARAKAT*
   Sering terjadi dimana program dan kegiatan pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah tidak sesuai dengan aspirasi dan keinginan masyarakat setempat
4. *KEBIASAAN MELAKUKAN KKN*
   Kebiasaan ini tidak hanya berdampak negatif terhadap pengelolaan keuangan negara, tetapi juga berdampak buruk terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan, baik nasional maupun daerah

BAB 12 : TEKNIK PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

TEKNIK INDIKATOR PEMBANGUNAN DAERAH

A. INDIKATOR EKONOMI DAERAH

Suatu dokumen perencanaan pembanguna daerah yang baik adalah bilamana bersifat konkret, jelas faktor penentunnya dan terukur. Sifat yang demikian sangat diperlukan supaya perencanaan pembangunan yang disusun mempunyai indikator yang jelas, sasaran dan target yang konkret, kebijakan yang tegas serta mudah dilaksanakan dalam praktiknya. Untuk keperluan ini, diperlukan analisis data secara kuantitatif dengan menggunakan metode atau teknik matematik dan statistik yag tidak harus terlalu tinggi dan rumit, tetapi cukup yang sederhana saja dan mudah dimengerti oleh publik. Akan tetapi, bila perencanaan hanya dilakukan secara kualitatif dan normatif saja, maka perencanaan tersebut menjadi tidak konkret dan tidak terukur, sehingga penyusunan anggaran serta monitoring dan evaluasi terhadap keberhasilan pelaksanaan rencana tersebut menjadi sulit dilakukan.

Namun demikian, kenyataan dilapangan menunjukan bahwa tidak semua ukuran tersebut dapat dihitung dengan menggunakan data statistik yang tersedia, karena keterbatasan data tersedia. Disamping itu, terdapat pula beberapa sektor dan bidang yang memang sulit diukur dengan menggunakan data kuantitatif seperti bidang sosial, agama dan budaya. Untuk mengatasi hal tersebut, pengukuran kondisi dan kemajuan pembangunan daerah dapat dilakukan melalui penggunaan Indikator Pembangunan Daerah. Indikator Pembangunan Daerah ini pada dasarnya merupakan indikasi atau tanda-tanda umum tentang kondisi dan perkembangan dari sesuatu aspek pembangunan daerah. Indikator Pembangunan Daerah tersebut terdiri dari Indikator Ekonomi Daerah dan Indikator Kesejahteraan Sosial.

Indikator Ekonomi Daerah yang meliputi :

1. STRUKTUR EKONOMI DAERAH

   Analisis tentang struktur ekonomi daerah diperlukan dalam perencanaan pembangunan daerah sebagai dasar untuk menentukan arah umum pembangunan daerah. Bila struktur perekonomian suatu daerah didominasi oleh kegiatan pertanian (agraris), maka arah pembangunan juga disesuaikan dengan struktur perekonomian daerah tersebut. Demikian pula sebaliknya bilamana struktur perekonomian suatu daerah sudah mulai didominasi oleh sektor industri atau jasa, maka kebijakan pembangunan daerah juga harus difokuskan pada kegiatan tersebut.

Disamping itu, analisis tentang struktur ekonomi daerah juga dapat digunakan untuk mengetahui tingkat kemajuan pembangunan dengan melihat pada kemajuan perubahan struktur ekonomi daerah bersangkutan.

2. PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH
   Aspek ini penting artinya mengingat pertumbuhan ekonomi daerah merupakan salah satu unsur penting dalam proses pembangunan daerah disamping aspek pemerataan dan stabilitas. Dengan kata lain, peningkatan kegiatan pembangunan suatu daerah akan sukar diwujudkan tanpa adanya pertumbuhan ekonomi daerah yang cukup tinggi.

3. TINGKAT KEMAKMURAN EKONOMI DAERAH
   Tingkat kemakmuran ini seringkali pula disebut sebagai tingkat kemakmuran kasar, karena hanya memuat aspek ekonomi saja, sedangkan aspek kemakmuran lainnya yang menyangkut bidang sosial belum termasuk didalamnya. Namun demikian, tingkat kemakmuran ekonomi tersebut dewasa ini lazim dipakai sebagai ukuran kemakmuran masyrakat, baik pada tingkat nasional maupun daerah. Pengukuran tingkat kemakmuran ekonomi daerah yang lazim digunakan adalah dalam bentuk nilai Pendapatan Perkapita yang dihitung dengan harga berlaku. Nilai ini dengan mudah dapat diketahui dengan jalan membagi nilai PDRB atas harga berlaku dengan jumlah penduduk daerah bersangkutan pada waktu (tahun) tertentu.

4. INCREMENTAL CAPITAL-OUTPUT RATIO (ICOR)
   Koefisien ICOR merupakan salah satu teknik yang populer dalam penyusunan perencanaan pembangunan. Penggunaan ICOR ini mula-mula muncul dalam Model Harrod-Domar dalam teori Ekonomi Makro yang membahas tentang pertumbuhan ekonomi nasional yang diinginkan (warranted rate of growth) serta menaksir kebutuhan investasi yang diperlukan untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi tersebut. Kedua aspek ini sangat penting dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan nasional sehingga kemudian ICOR ini juga menjadi populer dikalangan perencana pembangunan daerah.
   Pengertian ICOR secara ringkas adalah suatu koefisien yang menunjukan tambahan (incremental) modal (capital) yang diperlukan untuk mencapai peningkatan satu unit produksi (output) tertentu.

B. INDIKATOR KESEJAHTERAAN SOSIAL

Indikator Pembangunan Daerah lainnya yang juga tidak kalah pentingnya dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah adalah Indikator Kesejahteraan Sosial. Indikator ini pada dasarnya memberikan indikasi tentang peningkatan kesejahteraan sosial yang dapat dicapai oleh suatu daerah dalam periode tertentu.

Termasuk dalam Indikator Kesejahteraan Sosial meliputi :

1. INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

Indek Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI) muncul sebagai kritikan dan sekaligus sebagai perbaikan terhadap penggunaan angka pendapatan per kapita sebagai ukuran kemakmuram masyarakat yang hanya terfokus pada aspek ekonomi saja. Sedangkan kemakmuran masyarakat daerah tentunya tidak hanya mencakup aspek ekonomi saja, tetapi juga aspek sosial seperti tingkat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat. Untuk mengatasi kelemahan ini, muncul angka IPM yang merupakan indeks dari kombinasi tiga unsur penting kemakmuram masyarakat, yaitu Daya Beli (pendapatan), Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat. Melalui kombinasi ini, pengukuran tingkat kemakmuran masyarakat daerah akan menjadi lebih baik dan bersifat komprehensif, tidak hanya meliputi aspek ekonomi saja, tetapi juga aspek sosial yaitu tingkat pendidikan dan kesehatan masyarakat. Namun demikian aspek keadilan, kepuasan, keamanan, dan aspek lainnya yang juga merupakan unsur penting kemakmuran masyarakat masih belum tercakup dalam indeks ini.

2. GINI RATIO

   Kondisi ekonomi yang baik tidak hanya ditandai oleh peningkatan pertumbuhan ekonomi yang cukup cepat, tetapi juga dengan adanya pemerataan distribusi pendapatan yang lebih baik. Distribusi pendapatan yang relatif baik ditandai oleh kondisi dimana perbedaan antara golongan masyarakat kaya dan miskin yang tidak terlalu menyolok dalam perekonomian daerah bersangkutan. Pengukuran tingkat distribusi pendapatan antar golongan masyarakat kaya dan miskin dapat dilakukan dengan menggunakan angka koefisien Gini (Gini Ratio). Perhitungan Koefisien Gini ini adalah metode yang cukup terkenal untuk mengukur distribusi pendapatan personal dalam masyarakat.

3. TINGKAT KEMISKINAN

   Tingkat Kemiskinan adalah prosentase penduduk miskin yang terdapat di daerah bersangkutan, yang dapat dihitung baik untuk daerah pedesaan maupun daerah perkotaan maupun daerah administratif seperti propinsi, kabupaten dan kota.

   Sedangkan Penduduk Miskin pada dasarnya adalah golongan masyarakat yang jumlah pendapatannya belum dapat memenuhi kebutuhan pokok minimum dalam hidupnya. Kebutuhan pokok minimum tersebut meliputi bahan makanan, pakaian dan perumahan. Garis kemiskinan pertama yang dijadikan acuan di Indonesia adalah garis kemiskinan Sayogyo (sayogyo poverty line) yang didasarkan pada jumlah kalori minimum yang dibutuhkan oleh madyarakat untuk dapat hidup secara wajar.

4. TINGKAT PENGANGGURAN

   Secara umum pengukuran tingkat pengangguran ditentukan oleh dua unsur utama yaitu :

   1.Jumlah pencari kerja dan

2. Kemampuan penyediaan atau penyerapan tenaga kerja yang terdapat pada daerah yang bersangkutan.

   Jumlah pencari kerja dapat diketahui dari selisih antara jumlah penduduk umur kerja dengan jumlah penduduk bukan angkatan kerja seperti anak sekolah atau mahasiswa dan ibu rumah tangga.
   Sedangkan jumlah pengangguran akan dapat diketahui dengan jalan mengurangi perkiraan jumlah penyediaan atau penyerapan tenaga kerja dengan jumlah pencari kerja.

BAB 13 : TEKNIK PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

TEKNIK INDIKATOR KINERJA

Perencanaan yang baik adalah perencanaan yang terukur secara konkret sehingga sasaran yang akan dicapai menjadi lebih jelas.

Perencanaan yang terukur biasanya mempunyai target dan sasaran secara kuantitatif.

Sangat disadari bahwa sasaran dan target yang terukur sering kali tidak tepat karena perubahan yang tidak diduga dapat saja terjadi dalam pelaksanaan rencana. Namun demikian, perencanaan yang terukur masih tetap dianggap lebih baik daripada yang hanya bersifat normatif dan kualitatif.

Alasannya karena perencanaan terukur mempunyai sasaran yang jelas dan konkret sehingga nantinya akan lebih mudah melaksanakan, memonitoring (mengendalikan), dan melakukan evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan rencana pembangunan.

A. PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA

Dadang Solichin (2008), pengertian Indikator Kinerja (Performance Indicators) pada dasarnya adalah merupakan alat yang dapat membantu perencana dalam mengukur perubahan yang terjadi dalam proses pembangunan.
Sedangkan Indikator adalah ukuran dari suatu kegiatan dan kejadian yang berlangsung pada suatu negara atau daerah. Misal Indek Pembangunan Manusia (IPM) sebagai indikator kualitas pembangunan sumber daya manusia.
Lebih spesifik Indikator adalah angka statistik dan hal normatif yang menjadi perhatian para perencana yang dapat membantu dalam membuat penilaian ringkas, komprehensif, dan berimbang terhadap kondisi atau aspek penting pada suatu masyarakat.

Dengan kata lain, Indikator adalah variabel-variabel yang mengindikasikan atau memberi petunjuk kepada kita tentang suatu keadaan tertentu, sehingga dapat digunakan untuk mengukur perubahan yang terjadi (Green, 1992).

Dengan demikian, Indikator Kinerja pada dasarnya adalah uraian ringkas dengan menggunakan ukuran kuantitatif atau kualitatif yang mengindikasikan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan pembangunan yang telah disepakati dan ditetapkan sebelumnya dalam perencanaan (Dadang Solichin, 2008)

Kinerja (performance) pada dasarnya diartikan sebagai gambaran tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kebijakan, program atau kegiatan pembangunan dalam rangka mewujudkan Tujuan serta Visi dan Misi dari suatu negara, daerah atau organisasi (LAN, 1993).
Dengan kata lain, kinerja pada dasarnya adalah hasil (outcome) pembangunan yang dapat diciptakan oleh suatu organisasi atau badan yang memberikan kontribusi tertentu terhadap proses pembangunan secara keseluruhan.
Oleh karena itu kinerja pada dasarnya merupakan bentuk hasil pembangunan yang multidimensional sehingga cara mengukurnya sangat bervariasi tergantung pada banyak faktor (Dadang Solichin).
Maka analisis Indikator Kinerja tidak hanya cukup menekankan pada aspek biaya (cost) dan manfaat (benefit) yang diperoleh dari pelaksanaan program, dan kegiatan pembangunan tertentu, tetapi juga harus mencakup manfaat terhadap pembangunan secara keseluruhan yang meliputi bidang ekonomi, sossial dan budaya. Karena itu disamping aspek efisiensi keuangan, Indikator Kinerja juga mencakup aspek pemuasan kebutuhan masyarakat secara luas.

B. FUNGSI DAN MANFAAT INDIKATOR KINERJA

Secara umum fungsi dan peranan dari indikator kinerja dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah meliputi :

1. Untuk memperjelas tentang What, How, Who, and When suatu program dan kegiatan dilakukan
2. Menciptakan konsensus yang dibangun oleh pihak yang berkepentingan dengan pembangunan (Stakeholders)
3. Membangun landasan yang jelas untuk pengukuran dan analisis pencapaian sasaran pembangunan
4. Sebagai alat untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja pembangunan yang telah dapat dilaksanakan dalam periode waktu tertentu

Sedangkan manfaat Indikator Kinerja pada dasarnya adalah dapat dijadikan sebagai alat penilaian terhadap keberhasilan (kinerja) pelaksanaan pembangunan suatu negara atau daerah, baik pada tahap perencanaan (ex-ante), pelaksanaan (on-going) maupun setelah program pembangunan selesai dilaksanakan (ex-post).

C. JENIS INDIKATOR KINERJA

1. Indikator Kinerja Makro
   Menyangkut dengan keberhasilan pelaksanakan pembangunan yang bersifat menyeluruh atau lintas program dalam suatu negara atau daerah tertentu.

2. Indikator Kinerja Program dan Kegiatan
   Menyangkut dengan keberhasilan pelaksanaan pembangunan pada suatu program, dan kegiatan tertentu saja.

D. PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA

Lima jenis pengukuran Indikator Kinerja ;

1. Masukan (input)
2. Keluaran (output)
3. Hasil (outcome)
4. Manfaat (benefit)
5. Dampak (impact)

E. PERSYARATAN INDIKATOR KINERJA

Persyaratan Indikator Kinerja SMART :

1. SPECIFIC
2. MEASURABLE
3. ATTAINABLE
4. RELEVANT
5. TIMELY

F. TARGET KINERJA

1. Angka Numerik (kuantitatif)
2. Dapat Diperbandingkan
3. Bersifat Spesifik

G. LANGKAH OPERASIONAL PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA

1. Susun dan terapkan secara baik dan memenuhi kelayakan teknis dokumen Rencana Strategis Institusi bersangkutan yang meliputi Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang direncanakan.
2. Identifikasi secara jelas data dan informasi akurat dan relevan yang diperlukan untuk membantu memformulasikan jenis indikator kinerja yang tepat sesuai dengan kebutuhan perencanaan.
3. Teliti jenis dan jumlah sumber daya yang dibutuhkan, baik dalam bentuk dana, tenaga, dan peralatan diperlukan dalam penyusunan perencanaan atau evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan.
4. Pilih dan terapkan indikator yang paling relevan dan berpengaruh besar terhadap keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan bersangkutan.

H. CONTOH PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA

1. PEMBANGUNAN TERMINAL BUS ANTAR KOTA (kegiatan yang bersifat fisik)
   Indikator dari Evaluasi kinerja :
   i. Masukan (input) misal : cukup baik karena tingkat penyerapan dana yang hampir mencapai 100 %

ii. Keluaran (output) misal : cukup baik karena hasil konstruksi sesuai dengan perencanaan dan spesifikasi teknis dalam kontrak kerja
iii. Hasil (outcome) misal : sangat baik karena obyek yang dibangun sudah berfungsi dan dimanfaatkan masyarakat secara baik dan optimal
iv. Manfaat (benefit) misal : sangat baik karena keberadaan terminal telah dapat meningkatkan kelancaran angkutan bus dan perbaikan pelayanan penumpang
v. Dampak (impacts) misal : cukup baik karena keberadaan terminal tersebut ternyata sudah dapat meningkatkan penyediaan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat sekitarnya

2. PELAKSANAAN PENYULUHAN KESEHATAN MASYARAKAT (kegiatan yang bersifat non fisik)

Indikator dari Evaluasi kinerja :

i. Masukan (input) misal : cukup baik karena tingkat penyerapan dana mencapai 98 %
ii. Keluaran (output) misal : cukup baik karena jumlah masyarakat yang diberi ceramah dan jumlah pamflet yang ditempelkan sesuai dengan perencanaan dan spesifikasi teknis dalam kontrak kerja
iii. Hasil (outcome) misal : cukup baik karena masyarakat telah dapat memahami dengan baik pentingnya budaya hidup sehat
iv. Manfaat (benefit) misal : cukup baik karena masyarakat sudah mulai menerapkan budaya hidup sehat yang tercermin dari tingkat kebersihan rumah, jenis makanan dan cara melaksanakan kegiatan sehari-hari
v. Dampak (impacts) misal : sangat baik karena derajat kesehatan masyarakat setelah penyuluhan sudah dapat ditingkatkan yang terlihat dari menurunnya tingkat kematian bayi didaerah setempat

BAB 14 : TEKNIK PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

TEKNIK EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah perlu dilakukan untuk dapat mengetahui seberapa jauh rencana pembangunan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah dapat memberikan hasil (kinerja) sesuai dengan tujuan serta Visi dan Misi yang ditetapkan semula.

Karena itulah, untuk tingkat daerah kegiatan evaluasi ini sering pula dinamakan sebagai Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah (EKPD). Evaluasi pelaksanaan rencana ini penting artinya sesuai dengan amanat dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang mengamanatkan perlunya dilakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan, baik pada tingkat nasional maupun daerah.

Akan dibahas beberapa teknik evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang bersifat praktis sesuai dengan ketersediaan data dan ketentuan berlaku baik Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tata Cara Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan.

A. TUJUAN, SASARAN, DAN MANFAAT EVALUASI

1. Tujuan utama dari evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah adalah :
    a. Untuk dapat mengetahui faktor-faktor utama penyebab keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan rencana pembangunan daerah
    b. Sebagai masukan dan usul perbaikan dan penyempurnaan untuk perumusan penyesuaian kebijakan pembangunan guna meningkatkan keberhasilan pelaksanaan rencana pembangunan daerah dimasa yang akan datang

    Evaluasi Pelaksanaan rencana pembangunan daerah dapat dilakukan dalam berbagai bentuk :

    1. Evaluasi Tahunan seperti Laporan Kerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
    2. Evaluasi Pertengahan Jalan (Mid-term-Review) dari suatu RPJMD
    3. Evaluasi Tahunan (Annual Review)
    4. Evaluasi Lima Tahunan ketika melakukan penyusunan dokumen RPJMD

Kesemua jenis evaluasi ini dilakukan secara berkala sesuai dengan periode waktu masing-masing perencanaan

2. Sasaran utama dari evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah adalah untuk mengetahui seberapa jauh rencana yang telah ditetapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah dapat mencapai hasil (kinerja) yang telah ditetapkan dalam rencana semula
3. Manfaat dari evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah adalah :
   a. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana pembangunan
   b. Untuk memperoleh masukan (feedback), baik dalam bentuk kendala dan faktor keberhasilan pelaksanaan rencana yang selanjutnya digunakan untuk bahan pertimbangan dalam memperbaiki penyusunan rencana pembangunan dimasa mendatang

B. TEKNIK EVALUASI KINERJA MAKRO

Karena cakupannya yang bersifat lintas sektoral dan menyeluruh, Teknik Evaluasi Kinerja Makro ini sering kali juga disebut sebagai Teknik Evaluasi Komprehensif (Armstrong, 1978).

Karena sifat yang demikian, maka variabel dan indikator pembangunan yang digunakan juga bersifat menyeluruh (makro) seperti :

1. Pertumbuhan Ekonomi Daerah
2. Kemakmuran dan Kesejahteraan Masyarakat
3. Penyediaan Lapangan Kerja (Employement Creation)
4. Kemiskinan (Poverty) dll

Evaluasi Kinerja Makro (komprehensif) dilakukan untuk menilai keberhasilan kebijakan pembangunan daerah yang mencakup Aspek menyeluruh serta lintas sektoral.

Sedangkan Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan (Parsial) dilakukan untuk penilaian keberhasilan pelaksanaan pembangunan pada tingkat Program dan Kegiatan tertentu yang telah direncanakan semula.

Teknik Evaluasi Kinerja Makro dapat dilakukan dalam tiga bentuk:

1. Dengan membandingkan antara target pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam rencana dengan realisasi yang dapat dicapai dalam pelaksanaan pembangunan daerah
2. Bilamana target pembangunan secara kuantitatif tidak tersedia, maka teknik evaluasi yang dapat dilakukan adalah dengan membandingkan realisasi dari indikator pembangunan daerah yang tersedia dengan nilai rata-rata pada tingkat nasional atau tingkat provinsi
3. Dengan melihat trend perkembangan selama 5 tahun dari beberapa indikator pembangunan daerah utama

1. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI

   Teknik Evaluasi Komprehensif (Makro) paling sederhana yang dapat dilakukan dalam melakukan evaluasi pelaksanaan suatu perencanaan pembangunan daerah adalah dengan jalan membandingkan kondisi pembangunan sesudah rencana dilaksanakan dengan sebelumnya.
   Dengan cara demikian, tentunya pelaksanaan rencana tersebut dapat dikatakan berhasil bila kinerja pembangunan dalam daerah cakupan ternyata lebih baik dibandingkan dengan kondisi sebelum rencana tersebut diklaksanakan, dengan asumsi tidak terjadi suatu perubahan yang luar biasa dalam periode tersebut.
   Demikian pula sebaliknya bilamana kemudian ternyata kinerja pembangunan daerah tersebut tidak menjadi lebih baik sebagaimana yang direncanakan semula, maka rencana tersebut dikatakan kurang berhasil.
2. PERBANDINGAN DENGAN NILAI RATA-RATA
   Pertimbangan utama yang dijadikan dasar dalam penggunaan metode Evaluasi ini adalah bahwa keberhasilan pembangunan suatu bidang atau sektor tertentu akan dapat diketahui dengan jalan membandingkan realisasi pembangunan atau prestasi yang dapat dicapai dengan kondisi rata-rata dari unsur atau aspek yang sama.
3. ANALISIS TREND PERKEMBANGAN
   Pertimbangan utama yang dijadikan dasar dalam penggunaan metode Evaluasi ini adalah bahwa keberhasilan kinerja pembangunan daerah akan dapat pula dilihat dari trend perkembangan masing-masing indikator pembangunan daerah yang digunakan.

C. TEKNIK EVALUASI MAKRO SPESIFIK

Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah secara makro dapat pula dilakukan dengan menggunakan Indikator spesifik yang bersifat khusus.

1. EVALUASI PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA LOKAL
   Bahwa peningkatan kegiatan pembangunan secara makro dapat juga diwakili oleh penciptaan lapangan kerja lokal yang akan berpengaruh langsung bagi peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat daerah secara keseluruhan.
   Dengan demikian, keberhasilan pemerintah dalam mendorong peningkatan penyediaan lapangan kerja dapat diartikan sebagai keberhasilan pemerintah dalam mendorong proses pembangunan di daerahnya.
2. EVALUASI MOBILITAS INVESTASI DAERAH
   Penilaian keberhasilan pelaksanaan kebijakan pembangunan suatu daerah dapat pula dilakukan melalui analisis mobilitas investasi yang masuk ke daerah bersangkutan

D. TEKNIK EVALUASI KINERJA PROGRAM

Evaluasi pelaksanaan rencana dan kebijakan pembangunan daerah secara parsial dilakukan dengan melihat pada keberhasilan pelaksanaan pembangunan pada tingkat program atau proyek (kegiatan)

Evaluasi ini dikatakan parsial karena hanya melihat kepada sebagian dari kegiatan pembangunan daerah saja yang belum tentu menggambarkan kondisi pembangunan daerah secara keseluruhan.

1. TEKNIK EVALUASI INDIKATOR KINERJA

   Teknik ini menilai keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan berdasarkan konsep Evaluasi Kinerja menggunakan lima kriteria yaitu :

   i. Masukan (input)
   ii. Keluaran (output)
   iii. Hasil (outcome)
   iv. Manfaat (benefit) dan
   v. Dampak (impacts)

2. ANALISIS BIAYA DAN MANFAAT

   Analisis Biaya dan manfaat (cost benefit analysis) yang digunakan pada dasarnya adalah sama dengan teknik yang lazim dipakai pada penilaian kelayakan (evaluasi proyek) dengan menggunakan Analisis Biaya dan Manfaat (Cost and Benefit Analysis).

   Perbedaannya adalah bahwa pada evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah ini, data dan informasi tentang biaya dan manfaat yang digunakan dalam analisis adalah data realisasi karena program dan kegiatan tersebut sudah selesai dilaksanakan sebelumnya.

3. KERANGKA LOGIS

   Untuk menghemat biaya dan tenaga yang diperlukan, maka untuk program atau kegiatan yang lebih kecil, evaluasi kinerja cukup dilakukan dengan menggunakan teknik yang lebih sederhana yaitu Kerangka Logis (Log Frame) saja.

   Pada kerangka logis ini evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah dilakukan secara lebih sederhana dengan menggunakan sebuah tabel (matrik). Pada matrik ini dijelaskan latar belakang pelaksanaan kegiatan, tujuan, deskripsi program dan kegiatan, sasaran dan tolok ukur keberhasilan yang digunakan serta manfaat yang diharapkan dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan tersebut.

BAB 15 : PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

A. **PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH**

1. Periode Waktu RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah)
   Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan agar masing-masing daerah menyusun RPJPD untuk daerahnya masing-masing.
   RPJPD tersebut disusun untuk periode 20 tahun yang berisi visi,misi dan arah pembangunan jangka panjang daerah
2. Pola Penulisan RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah)
   a. Pola Penulisan RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) Versi BAPPENAS
   b. Pola Penulisan RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) Versi DEPDAGRI
3. Kondisi Umum Daerah
   Pada dasarnya berisikan gambaran menyeluruh tentang kondisi daerah bersangkutan pada saat ini yang selanjutnya menjadi dasar utama untuk penyusunan proyeksi kedepan dan penyusunan visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang daerah.
4. Analisis Isu Strategis Daerah
   Kondisi atau perubahan penting yang telah atau sedang terjadi yang diperkirakan akan sangat mempengaruhi perkembangan pembangunan daerah dimasa mendatang.
5. Prediksi Sasaran Umum Pembangunan Daerah
   a. Prediksi Sasaran Umum Pembangunan Ekonomi
   b. Prediksi Sasaran Umum Pembangunan Sosial
   c. Prediksi Sasaran Tata-Ruang dan Pembangunan Wilayah

6. Penerapan Visi dan Misi Pembangunan Daerah
   Merupakan bagian penting, baik dalam RPJP nasional maupun daerah. Namun perlu dibedakan antara Visi dan Misi RPJM dan RPJP.
7. Perumusan Arah Pembangunan Daerah
   Berisikan kondisi dan hasil yang ingin dicapai sampai akhir periode perencanaan dalam bidang dan aspek tertentu guna mewujudkan visi pembangunan secara keseluruhan.
8. Pentahapan Pembangunan Daerah
   Sangat diperlukan dalam penyusunan RPJPD mengingat orientasi dokumen perencanaan ini adalah pada pembangunan jangka panjang yang pencapaiannya memerlukan waktu cukup lama, yaitu 20 tahun.

B. PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

1. Periode Waktu RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)
2. Pola Penulisan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)
3. Kondisi Umum Daerah
4. Kerangka Ekonomi Makro dan Sumber Pembiayaan
5. Visi dan Misi Kepala Daerah
6. Strategi Pembangunan Daerah
7. Arah Kebijakan Keuangan Daerah
8. Arah Kebijakan Umum Daerah
9. Pembangunan Berdimensi Wilayah
10. Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah
11. Indikator Kinerja
12. Matrik Program dan Kegiatan

C. PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

1. Pengertian Rencana Strategis
2. Kaitan Antara Renstra SKPD dan RPJMD
3. Proses Penyusunan Renstra SKPD
4. Kondisi Umum SKPD
5. Isu Strategis Daerah
6. Prediksi dan Sasaran Jangka Menengah
7. Perumusan Strategi dan Kebijakan Pembangunan
8. Perumusan Program dan Kegiatan Pembangunan
9. Indikator Kinerja Program dan Kegiatan

D. PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

1. Pengertian Rencana Kerja Pemerintah Daerah
2. Peranan Rencana Tahunan
3. Unsur Rencana Tahunan
4. Keterkaitan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
5. Keterkaitan RKPD dengan APBD

6. Kerangka Penulisan RKPD
7. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Tahun Sebelumnya
8. Penilaian Ketersediaan Dana Pembangunan Daerah
9. Perumusan Kebijakan Tahunan
10. Penerapan Program dan Kegiatan RKPD
11. Indikator dan Target Kinerja

E. **PENYUSUNAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

1. Pengertian Renja SKPD
2. Keterkaitan Renstra SKPD dengan Dokumen Lainnya
3. Kerangka Penulisan Renja SKPD
4. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Tahun lalu
5. Perumusan Kebijakan Pembangunan Tahunan
6. Analisis Kemampuan Sumber Pembiayaan
7. Penetapan Program dan Kegiatan Prioritas
8. Indikator dan Target Kinerja
9. Pagu Dana Indikatif

BAB 16 : UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS)

UNIVERSITAS JAYABAYA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
UJIAN AKHIR SEMESTER GANJIL (UAS) TAHUN AKADEMIK 2021/2022

MATA KULIAH : PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DOSEN : DRS.DERADJAT M. SASOKO, MM
HARI/TANGGAL : KAMIS 6 JANUARI 2022
WAKTU : 90 MENIT (11.30-13.00)
RUANG : ONLINE/WAG

KERJAKAN DENGAN TELITI DAN BENAR

SOAL :

1. Sejak tahun 2005, Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan di Indonesia mengalami perubahan yang cukup penting dan mendasar. Perubahan tersebut terjadi dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Berikan gambaran secara ringkas tentang konsep dan prinsip pokok yang berkaitan dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah
2. Sebutkan dan Jelaskan persyaratan untuk terjaminnya Pelaksanaan Rencana.
3. Indikator Kinerja pelaksanaan program dan kegiatan mempunyai beberapa unsur atau alat pengukuran yang sudah lazim digunakan oleh para perencana. Terdapat lima jenis pengukuran indikator kinerja yang dapat digunakan dalam merencanakan atau menilai keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dari suatu institusi atau daerah. Sebutkan dan jelaskan indikator tersebut.

4. Berikan penjelasan dari tiga pernyataan (a, b, c) dibawah ini yang anda ketahui
    a. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah perlu dilakukan untuk dapat mengetahui seberapa jauh rencana pembangunan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah dapat memberikan hasil (kinerja) sesuai dengan tujuan serta Visi dan Misi yang ditetapkan semula.
    b. Kondisi Umum Daerah
       Pada dasarnya berisikan gambaran menyeluruh tentang kondisi daerah bersangkutan pada saat ini yang selanjutnya menjadi dasar utama untuk penyusunan proyeksi kedepan dan penyusunan visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang daerah.
    c. Analisis Isu Strategis Daerah
       Kondisi atau perubahan penting yang telah atau sedang terjadi yang diperkirakan akan sangat mempengaruhi perkembangan pembangunan daerah dimasa mendatang.

====SELAMAT MENGERJAKAN====

REFERENSI BUKU PEGANGAN :

I. PERENCAAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM ERA OTONOMI (SJAFRIZAL)
II. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Teori dan Aplikasi (Prof. MUDRAJAD KUNCORO, Ph.D.)
III. PENDEKATAN BARU PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (Dr. WIDODO SIGIT PUDJIANTO, SH., M.H.)